

Buletin Parlementaria

Nomor 1103/II/V/2020 • Mei 2020

MENALIKAN...
SEMBAKO GRATIS BAGI TENAGA HONORER, OD, OS, dan...
DI LINGKUNGAN KESEKJENAN DPR - RI

GEDUNG NUSANTARA DPR-RI, 4 MEI 2020
PUKUL : 10.00 WIB - 16.00 WIB



Ketua DPR: Kita Butuh Gotong Royong Berskala Besar



5 DPR Gelar Rapat
Gabungan Bahas
Percepatan
Penanggulangan Covid-19



14 Jangan Ada Lagi Ego
Sektoral dalam
Penanganan Covid-19



9 772614 339005



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani berfoto bersama Pimpinan DPR RI dan Anggota PIA DPR RI dalam acara baksos PIA DPR RI. Foto: Eno/MAN

Ketua DPR: Kita Butuh Gotong Royong Berskala Besar

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai masalah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda Indonesia hanya dapat diatasi secara bersama-sama, berkesinambungan, dan gotong royong yang melibatkan semua pihak. Oleh karenanya, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengimbau semua pihak bergerak untuk membantu sesama, terutama untuk mereka-mereka yang terdampak langsung wabah Covid-19.

"Di masa pandemi ini, kita tidak hanya perlu pembatasan sosial skala besar, tapi kita juga butuh gotong royong berskala besar. Kita tengok tetangga kita, kita lihat apakah ada yang butuh bantuan. Mari kita bergotong royong, memupuk semangat solidaritas sosial untuk mengatasi dampak Corona," kata Puan dalam kegiatan bakti sosial Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/5).

Puan mengakui, tidak mudah bagi semuanya menghadapi dan menjalani

kehidupan di tengah-tengah pandemi Covid-19. Selain harus menjalani hidup bersih dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, *hand sanitizer*, dan menjaga kesehatan, menjaga jarak atau *physical distancing* sangat penting dilakukan. Meski demikian kewajiban, tanggung jawab dan tugas tetap harus dijalankan.

"Semua itu harus kita lakukan secara bersama-sama atau bergotong royong. Gotong royong sangat diperlukan agar kita bisa segera mengakhiri pandemi ini. Karena pandemi ini dapat kita selesaikan, jika kita bersama-sama menyelesaikannya," pungkas legislator dapil Jawa Tengah V ini sembari berharap pandemi ini segera berakhir.

Terkait dengan kegiatan baksos yang digelar PIA DPR RI, Puan mengapresiasi bantuan berupa 1.700 lebih paket sembako kepada karyawan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, khususnya bagi karyawan di Kompleks Parlemen, dan di rumah jabatan DPR RI Kalibata maupun Ulujami, Jakarta, yang terdampak langsung Covid-19.

Hal tersebut merupakan wujud gotong royong secara sosial untuk membantu pihak-pihak yang telah membantu kinerja Anggota Dewan di Parlemen. Menurutnya, gotong royong melawan Covid-19 bukan hanya membantu dari sisi kesehatan saja, namun juga bantuan secara sosial. "Ini bentuk gotong royong untuk bapak dan ibu semua, jangan dilihat jumlahnya namun sebagai rasa empati kita semua. Bantuan tersebut merupakan kepedulian kepada orang-orang yang selalu membantu tugas kinerja anggota DPR," ujar mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Hadir dalam acara pemberian bantuan sembako tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Muhaimin Iskandar, Anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Ketua PIA DPR RI Tri Utut Adianto, Wakil Ketua PIA DPR RI Lita Azis Syamsuddin dan Rustini Muhaimin Iskandar, Ketua Panitia Baksos PIA DPR RI Nita Jhon Aziz, serta beberapa pengurus PIA DPR RI lainnya.

■ ayu/es/sf

DPR Terus Proaktif Tangani Covid-19

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI secara khusus dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 terus bergerak secara pro-aktif dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Dasco mengungkapkan, Satgas Lawan Covid-19 tiada hentinya memberikan bantuan kepada masyarakat luas baik dalam bentuk obat-obatan, paket herbal berupa HerbaVid-19 maupun Alat Pelindung Diri (APD) ke penjuru Tanah Air.

Bahkan, sambung Dasco, tidak hanya bantuan dalam bentuk obat-obatan, HerbaVid-19 maupun APD, namun juga DPR RI melalui Satgas Lawan Covid-19 juga terus memberikan bantuan peralatan *rapid-test* ke berbagai Rumah Sakit (RS) baik di wilayah DKI Jakarta maupun di berbagai daerah Indonesia. Penegasan itu disampaikan Dasco usai menerima kunjungan Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Indonesia di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5).

“Kami segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI khususnya yang tergabung dalam Satgas Lawan Covid-19 terus memberikan bantuan, bukan hanya dalam obat-obatan tetapi kami juga sudah dan akan terus memberikan bantuan dalam bentuk APD termasuk peralatan *rapid-test* ke rumah

sakit-rumah sakit baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta yaitu di daerah-daerah dan terus berjalan,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Senada dengan Dasco, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menandakan bahwa DPR RI terus berperan aktif menjalankan tugas mulia untuk memberikan bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terutama, bantuan kepada pasien Covid-19 baik bantuan dalam bentuk HerbaVid-19, APD dan berbagai bantuan lainnya ke berbagai RS, Puskesmas maupun di tempat karantina mandiri masing-masing. Termasuk saat ini, ungkap Melki sapaan akrabnya, saat ini DPR RI juga telah membentuk posko dapur umum untuk membantu masyarakat luas.

“Sejauh ini, DPR telah dan akan terus memberikan bantuan. Saya kira, sudah ribuan bantuan yang tersebar di berbagai Provinsi/Kabupaten/ Kota. Saat ini DPR di 10 titik juga membagikan sembako atau bantuan makanan untuk berbuka puasa dan sahur. Ke depannya, DPR juga akan terus bersinergi dengan semua pihak untuk melakukan aksi kemanusiaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan peran DPR secara lebih konkret di berbagai daerah,” pungkas politisi F-Golkar itu. ■ pun/sf



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima kunjungan GP Jamu Indonesia. Foto: Yoga/MAN



Ketua DPR: Kita Butuh Gotong Royong Berskala Besar

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Ritzka Arinindy, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyawati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallio, Fajar Suryanto

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

FOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aldah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E., Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Paripurna DPR Terima IHPS II 2019

DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019, disertai penyerahan Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019 dan penyampaian IHPS II Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan ini akan diteruskan pada Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk dilakukan pendalaman sebagaimana menjalankan fungsi pengawasan Dewan terhadap mitra kerja Pemerintah.

Dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5) yang dipimpin Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua BPK Agung Firman di hadapan peserta rapat menyampaikan sejumlah temuan terkait pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Turut hadir Pimpinan DPR RI lainnya seperti Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rahmat Gobel.

Ketua BPK Agung Firman menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya menemukan 5.480 permasalahan pengelolaan anggaran dalam 4.094 temuan meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan dan didominasi permasalahan yang tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif. Hal itu tertuang dalam pokok-pokok Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019.

“Rinciannya sebanyak 51 persen atau 2.784 masalah ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,35 triliun, kemudian 1.725 masalah ketidakpatuhan atau 31 persen mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan penerimaan kurang sebesar Rp 6,25 triliun dan 971 masalah atau 18 persen masalah sistem pengendalian intern yang lemah,” jelas Agung dalam laporan yang disampaikan.

Diketahui, IHPS ini memuat

ringkasan hasil pemeriksaan BPK dalam periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Ikhtisar tersebut memuat 488 LHP BPK pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan badan lainnya. “Laporan itu meliputi hasil pemeriksaan atas satu laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja atau 54 persen, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebanyak 45 persen,” papar Agung.

IHPS II tahun 2019 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik dan rekomendasi pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan lainnya. Disebutkan juga bahwa dalam kurun 15 tahun terakhir BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi yang mendorong pemerintah, BUMN/BUMD dan badan lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, dan efektif.

“Dari jumlah itu sebanyak 416.680 rekomendasi atau 74,3 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi,” ungkap Agung. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, IHPS II 2019 ini akan diteruskan kepada Komisi dan AKD untuk dilakukan pendalaman, sebagaimana DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja terkait. ■ hs/sf



Pimpinan DPR RI menerima IHPS II tahun 2019 dan LHP Semester II Tahun 2019 dari Pimpinan BPK RI dalam Rapat Paripurna. Foto: Jaka/MAN

DPR Gelar Rapat Gabungan Bahas Percepatan Penanggulangan Covid-19

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel membuka Rapat Kerja Gabungan secara virtual antara Komisi VI, VII dan IX DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala LPNK (BPPT, LIPI, LAPAN), Kepala BPOM, dan Direktur LBM Eijkman.

Rapat gabungan tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan beberapa agenda pembahasan, yakni percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia; koordinasi, hilirisasi, dan komersialisasi produk-produk hasil konsorsium riset dan inovasi Covid-19 dalam penanggulangan wabah Covid-19; serta percepatan pengkajian dan pengembangan vaksin dan obat Covid-19 di Indonesia.

"Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi global Covid-19 yang sangat memprihatinkan. Kita ketahui bersama bahwa berdasarkan data jumlah kasus positif virus Corona di Indonesia sudah mencapai 11.587 jiwa. Sebuah angka yang tinggi dan penyebarannya pun cukup masif dan merata. Dimana kasus positif sudah bisa ditemukan mulai dari kota besar hingga pelosok pedesaan," ucap Gobel saat membuka jalannya rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5).

Dikatakannya, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini memberikan dampak yang kompleks dan meluas. Oleh karenanya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia ini harus



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Jaka/MAN

berada cepat dengan waktu. Gobel menyampaikan, dalam menghadapi pandemi ini Pemerintah dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya yaitu kurangnya alat bantu pernafasan, kurangnya *test kit* pendeteksi Covid-19, serta permasalahan-permasalahan lainnya.

"Telah kita ketahui bersama, Menristek/Kepala BRIN sudah membentuk konsorsium riset dan inovasi Covid-19 yang mana tujuannya adalah mendukung pekerjaan dari Gugus Tugas Covid-19 dalam bidang penelitian, pengkajian, dan penerapannya," ungkap Gobel.

Produk-produk dari konsorsium ini, tambah politisi Partai NasDem ini, diantaranya adalah pengembangan alat kesehatan yang tentunya dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan Pemerintah tersebut. "Oleh karena itu dukungan dan koordinasi yang baik sangat diperlukan dari seluruh elemen yang terkait," tandasnya.

Usai membuka dan menyampaikan sambutan pengantar rapat, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menyerahkan Rapat Kerja Gabungan tersebut untuk dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.

Dalam kesempatan itu, Sugeng menyampaikan, salah satu kesimpulan dari Rapat Kerja/ RDP Komisi VII DPR RI dengan Menristek/Kepala BRIN, BPPT, LIPI, LAPAN dan Direktur LBM Eijkman pada tanggal 14 April 2020 lalu, bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Menristek/Kepala BRIN melalui konsorsium riset dan inovasi Covid-19 untuk segera mempercepat pelaksanaan program konsorsium, diantaranya pengembangan alat kesehatan seperti *portable* ventilator hingga pengembangan vaksin dan obat Covid-19. Termasuk juga peta penanganan dan langkah prioritas dalam urgensi penanggulangan Covid-19. ■ dep/es

Abdul Kharis Minta Tokopedia Patuhi Standar Keamanan Data Pengguna

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti kasus dugaan peretasan data 91 juta akun pengguna *e-commerce* Tokopedia di *dark web*. Menurutnya, Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban memenuhi Standar Perlindungan Data Pribadi pengguna.

“Sebagaimana yang dimuat dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Bab 5, kewajiban pengguna pasal 28 dijelaskan bahwa melindungi data Pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab PSE,” ungkap politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini dalam siaran persnya, Selasa (5/5).

Kharis melanjutkan, walaupun data yang berkaitan dengan nama, alamat *email*, nomor telepon atau sebagiannya saja yang sudah didapatkan oleh pelaku pencurian data, dalam hal ini Tokopedia tetap harus bertanggungjawab menjaga dan menjamin dengan membuat sistem yang sebaik mungkin.

“Meskipun *password* dan informasi krusial pengguna dikatakan Tokopedia tetap terjaga, saya tetap menyarankan kepada pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti *password* akunnya secara berkala demi keamanan, dan Tokopedia harus memastikan enkripsi data dan keamanannya untuk dibenahi,” sambung Kharis.

Selain itu, legislator dapil Jawa Tengah V ini juga meminta Menteri

”

BAHWA MELINDUNGI DATA PRIBADI BESERTA DOKUMEN YANG MEMUAT DATA PRIBADI TERSEBUT DARI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PSE

Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk terus secara serius dan menyeluruh melakukan evaluasi, penyelidikan, mitigasi teknis dan *update* perkembangannya kepada masyarakat dengan terbuka dan transparan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Foto: OJI/AMAN

“Menkominfo bersama BSSN bisa membantu Polri agar aktif melakukan penyelidikan dengan berlandaskan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen agar semua pihak yang bertanggungjawab ditegakkan hukum atasnya dan memastikan Konsumen Indonesia tetap terlindungi data dan keamanannya” tutup Kharis. ■ ann/sf



Hindari Krisis Pangan, Pemerintah diminta Percepat Pola Tanam



Anggota Komisi II DPR RI Hugua. Foto: Eot/MAN

Mengamati kondisi pandemi Covid-19 yang belum menandakan adanya penurunan, Anggota Komisi II DPR RI Hugua meminta Pemerintah Indonesia, dalam hal ini instansi teknis, untuk segera mengambil langkah yakni dengan mempercepat pola tanam guna menghindari krisis pangan yang bisa saja terjadi.

“Kami memperkirakan hingga akhir Mei 2020 ini penyebaran Covid-19 masih tinggi, maka kemungkinan masa tanggap darurat akan diperpanjang hingga Agustus atau September 2020. Meskipun data statistik menyebutkan hingga Juni 2020 stok pangan khusus

beras masih cukup aman,” kata Hugua dalam keterangan persnya kepada *Parlementaria*, Jumat (1/5).

Politisi PDI-Perjuangan dapil Sulawesi Utara itu mengungkapkan, setelah Juni 2020 bisa jadi negara akan menghadapi kekurangan pangan, sehingga hal ini harus diantisipasi dengan serius karena seluruh energi bangsa saat ini terkuras habis pada kegiatan medis dan non-medis melawan Covid-19.

“Meskipun Pemerintah Pusat telah mengeluarkan stimulus untuk membantu petani khususnya petani gurem, namun pasti belum sepenuhnya menyelesaikan ancaman kelangkaan pangan. Karena masalah utama yang dihadapi akibat Covid-19

adalah terganggunya rantai distribusi logistik secara nasional,” tambah Hugua lebih lanjut.

Ia mengingatkan bahwa dengan ketatnya penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak, tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan terganggunya rantai distribusi barang dan jasa, termasuk sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit dan obat-obatan.

“Soalnya ini pandemi global dan jika pandemi ini tidak menurun dalam 3-6 bulan ke depan, maka menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO), dapat memicu krisis ekonomi dan krisis pangan global,” ujarnya.

Hugua juga meminta kepada Mendagri untuk membuat kebijakan khusus guna mendorong pemerintah daerah bergotong royong bersama rakyat untuk berswasembada pangan, khususnya pangan non-beras seperti biji-bijian, umbi-umbian, sagu, palawija dan bahan pangan lokal lainnya.

“Pangan non-beras ini penting karena jenisnya sangat beragam, areanya lebih luas dari persawahan, mencakup seluruh provinsi, lebih mudah dikembangkan oleh petani dengan teknologi lokal serta dapat menerapkan saprodi lokal seperti pupuk organik, bibit lokal dan obat-obatan organik lokal buatan petani sendiri,” katanya. Dengan demikian, Hugua yakin walaupun terjadi gangguan rantai pasokan saprodi pertanian akibat pandemi Covid-19, tidak akan mengurangi hasil panen petani. ■ dep/es

Sari Yulianti Dukung Kebijakan Kartu Prakerja



Anggota Komisi III DPR RI Sari Yulianti (tengah). Foto: OJI/MAN

Anggota Komisi III DPR RI Sari Yulianti mengatakan bahwa kebijakan Kartu Prakerja dengan target peserta 5,6 juta orang yang dikeluarkan Pemerintah perlu mendapat dukungan supaya hasilnya maksimal, meskipun sebagai kebijakan yang dinilai baru dan masih dievaluasi oleh beberapa kalangan.

“Saya mendukung kebijakan yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Kartu Prakerja dan hal ini perlu kita dukung bersama semua Partai Koalisi,” ujar Sari dalam siaran pers yang disampaikan kepada *Parlementaria*, Kamis (30/4).



**MENDUKUNG
KEBIJAKAN YANG
DIARAHKAN PRESIDEN
JOKO WIDODO
UNTUK MEMBERIKAN
PELATIHAN DAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM
KARTU PRAKERJA**

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, program Kartu Prakerja sudah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019, jadi ini adalah bentuk realisasi dari janji kampanye Presiden Jokowi. Mengenai kontroversi delapan *platform* yang menjadi penyelenggara tanpa tender, Sari beranggapan bahwa semua sudah sesuai prosedur.

“Mengacu pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemi Covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa Pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur,” tutup legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu. ■ eko/es

Program Cetak Sawah, Salah Satu Kebijakan Anomali

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai program cetak sawah baru tahun 2020 yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo sebagai kebijakan yang anomali. Ia mengatakan, untuk tahun-tahun sebelumnya, program cetak sawah baru merupakan sebuah harapan untuk menggenjot produksi pangan yang terutama beras yang selalu impor sejak tahun 1969 hingga sekarang. Pada zaman pemerintahan Presiden Kedua RI Soeharto, hanya sekitar 10 tahunan impor beras dapat ditekan di bawah 1 juta ton.

Bahkan satu tahun sempat swasembada hingga ekspor 231 ribu ton sekitar tahun 1985 hingga 1986. "Saat ini, kebijakan program cetak sawah ini bener-bener anomali. Pertama, tidak mengingat sejarah, dimana Rp 1,6 triliun lenyap dari APBN akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional," ungkap Akmal dalam rilisnya kepada **Parlementaria**, Jumat (1/5).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, anggaran cetak sawah sebesar Rp 209,8 miliar pada postur anggaran tahun 2020, dipangkas menjadi Rp 10,8 miliar akibat penghematan, kini setelah *refocussing* menjadi Rp 0. "Percetakan sawah ini butuh waktu minimal 1 tahun. Itupun di luar proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan. Masa wabah Covid-19, cetak sawah belum proses tanam, keburu rakyat kelaparan akibat kekurangan pangan," jelas Andi Akmal.

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan II ini meminta kepada Pemerintah untuk dapat lebih bijak dalam menjalankan pemerintahan ini. Terlebih di masa

wabah pandemi Covid-19, akan memperlihatkan kecakapan Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur sebuah negara yang sangat besar ini. Ia menyampaikan, pada evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah sudah mengakui bahwa masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal.

Sehingga optimalisasi pemanfaatan sawah-sawah yang sudah dicetak periode 2014-2019 lebih baik dilakukan dari pada membuka lahan baru apalagi lahan gambut. "Pemerintah jangan membuat *statement* yang seperti mimpi saja. Mau bangun program anggarannya di-nol-kan. Terlalu naif," tukas Andi Akmal.

Akmal juga mengingatkan bahwa upaya mempercepat pencapaian surplus beras nasional 10 juta ton tahun sejak tahun 2014 belum signifikan mengurangi kegiatan impor Tanah Air. Bahkan sejak beberapa waktu terakhir ini tentara pun dilibatkan, yakni melalui kegiatan Tentara Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP). Tapi tetap saja hingga kini belum terjadi

perubahan terhadap stabilitas cadangan pangan nasional.

Ia menegaskan bahwa pernyataan Pemerintah untuk membuat perencanaan cetak sawah di Kalimantan Tengah sekitar 900.000 hektar yang merupakan mayoritas tanah basah dan lahan gambut adalah ucapan *ceplas-ceplos* tanpa dasar. Dikatakannya, kepanikan akibat peringatan Organisasi Pangan Dunia (FAO) tentang adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi Covid-19 memang harus disikapi. Tapi penyikapan itu mesti dilakukan dengan kemampuan negarawan yang mumpuni.

"Saya meminta Pemerintah jangan mengambil langkah yang hanya menghamburkan uang negara. Penyelamatan rakyat Indonesia akibat Covid-19 ini memang perlu dilakukan terutama memenuhi kebutuhan pangan. Pikir ulang program cetak sawah di lahan gambut, yang ibarat menggarami lautan, kerja keras tapi tiada hasil," tutup Andi Akmal yang juga Anggota Komisi IV DPR RI pada periode 2014-2019 ini. ■ dep/sf



Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Runi/MAN

Selamatkan Pertanian, BMKG Diminta Antisipasi Kemarau Panjang

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk segera fokus mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu untuk mengantisipasi jelang semakin mendekatnya musim kemarau. Dimana, musim kemarau yang akan tiba dalam waktu dekat tersebut diprediksi oleh sejumlah kalangan akan berlangsung lebih panjang dari biasanya. Sehingga, hal itu dikhawatirkan berdampak terhadap sektor pangan atau pertanian.

Namun, fokus kebijakan antisipasi tersebut juga harus dilaksanakan dengan tidak melupakan penanganan pandemi Covid-19. Pemaparan tersebut disampaikan Aras saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS) Bagus Puruhito dan Plt. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) Danis Hidayat yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (5/5).

“Kami tentu menginginkan bahwa penanganan Covid-19 menjadi bagian dari fokus kita bersama. Namun, seperti diketahui dalam waktu tak lama lagi di tahun ini kita akan memasuki musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Sehingga, dalam hal penyediaan pangan serta dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan terutama sektor pertanian tentu itu tidak kalah jauh lebih penting,” ujar Aras.

Tak hanya itu, politisi F-PPP tersebut mengungkapkan tujuan dari fokus



Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras. Foto: Jaka/MAN

antisipasi terhadap musim kemarau panjang itu juga bertujuan agar krisis yang mulai tengah dirasakan saat pandemi Covid-19 tidak berimbas kepada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di sisi lain, Aras juga mengharapkan BMKG dan BASARNAS terus tampil sebagai lembaga negara yang eksis. Mengingat, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk kategori rawan bencana sehingga kehadiran BMKG sangat penting untuk siap sedia setiap saat.

“Sehingga, anggaran yang diperuntukkan untuk anggaran bencana tidak dialihkan begitu saja. Serta, jangan sampai tidak mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di beberapa daerah. Di beberapa daerah, hari-hari ini di beberapa tempat juga sudah mulai lagi ada banjir

bandang. Sehingga, kita berharap bahwa kesiapsiagaan baik dari BMKG dan BASARNAS ini juga tidak boleh terlupakan karena penanganan pandemi Covid-19,” tandas Aras sembari mengingatkan.

Namun demikian, di sisi lain legislator dapil Sulawesi Selatan II tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya ia mendukung secara penuh kebijakan lembaga BMKG, BNPP/BASARNAS dan BPWS selaku mitra kerja dari Komisi V DPR RI. Sehingga, ungkap Aras, masing-masing penanganan terutama yang berkaitan dengan Covid-19 oleh ketiga lembaga tersebut itu bisa berjalan lebih baik. Dengan demikian, hal tersebut bisa membuat Indonesia keluar dari pandemi Covid-19 secara lebih cepat. ■ pun/sf

DPR Minta Pemerintah Satukan *Big Data* UMKM

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong seluruh organisasi yang menaungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun koperasi di Indonesia turut serta mendesak Pemerintah agar seluruh pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM nasional dapat hanya terfokus di bawah wewenang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan bukan di kementerian/ lembaga lainnya. Tujuannya, diharapkan ke depannya dapat terciptanya pemersatuan *big data*.

Sehingga, dapat mewujudkan terlaksananya pemberdayaan terhadap UMKM yang tepat sasaran, tepat arah dan tepat anggaran. Demikian

disampaikan Demer, sapaan akrab Gde Sumarjaya saat mengikuti RDPU Komisi VI DPR RI dengan Ketua Umum Asosiasi Business Development Services Indonesia, International Council for Small Business Indonesia, Ketua Fokus UMKM, dan Kepala Lembaga Pendidikan Koperasi terkait Pembahasan Pelaksanaan Program Pemerintah terkait UMKM terkait dampak Covid-19 secara virtual, Senin (4/5).

“Persoalan UMKM kita itu adanya persoalan data. Ditambah, saat ini pemberdayaan terhadap UKM itu ada 18 Kementerian. Harus ada tekanan publik, sehingga tiap kementerian lain bisa melepas ego sektoralnya. Jadi, melalui itu kita bisa menyatukan pemberdayaan UKM untuk ditentukan sektor mana saja yang harus lebih

banyak didukung dan potensi *survive* di tengah kondisi pandemi ini. Kalau mempunyai data yang baik, maka bisa lebih tepat sasaran dan lebih kepada penerima pemberdayaan tersebut,” ujar Demer.

Di sisi lain, ungkap Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) tersebut, di berbagai provinsi juga terdapat pemberdayaan UMKM. Baik itu di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasinya maupun di Dinas Pertanian. Belum lagi, tutur Demer, di berbagai tingkat kabupaten dan kota juga terdapat pemberdayaan UMKM melalui anggaran yang berbeda, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait hal itu, legislator dapil Bali ini kembali menegaskan harapannya agar pemersatuan data UMKM dapat segera diterapkan seperti halnya lembaga riset. Dimana, lembaga tersebut sudah dijadikan satu pendanaannya dari berbagai Kementerian. Seharusnya, tandas Demer, di awal waktu berdirinya Kemenkop UKM seluruh pemberdayaan terhadap koperasi dan UKM difokuskan kepada kementerian yang dipimpin Teten Masduki itu.

“Dan kalau sudah jadi satu, tentu *big data*-nya bisa terjadi. Kalau *big data*-nya sudah bisa terjadi, maka bisa terwujudnya pemberdayaan yang tepat sasaran dan tepat arah. Ini sebenarnya kegunaan sudah lama, tapi tidak kunjung terealisasi dengan baik tentang *big data* dan *artificial inteligent* ini yang mampu kita ciptakan untuk pemberdayaan yang tepat sasaran dan tepat guna. Mudah-mudahan, ini bisa segera menjadi kenyataan terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” pungkas Demer. ■ pun/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Azka/MAN

Komisi VII Minta Pemerintah Perhatikan Harga Gas Industri di Sektor Hilir



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Jaka/MAN

Komisi VII DPR RI meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif untuk melakukan penurunan harga gas industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 agar menjaga keberlangsungan usaha badan usaha hilir minyak dan gas bumi, menyusul diterapkannya harga gas menjadi 6 dollar Amerika Serikat (AS) per MMBTU (Millions British Thermal Units).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM yang digelar secara virtual itu mengatakan, penurunan harga gas dilakukan melalui penyesuaian harga hulu dengan pengurangan porsi Pemerintah dan tetap mempertimbangkan keekonomian industri yang termasuk dalam Perpres tersebut.

“Penurunan harga gas dilakukan melalui penyesuaian harga hulu dengan pengurangan porsi pemerintah dan tetap mempertimbangkan keekonomian industri yang termasuk dalam Perpres 40/2016, serta BUMN yang menerima subsidi dan kompensasi gas, dan dengan margin yang wajar untuk menjaga keberlangsungan usaha BUMN dan Badan Usaha Hilir lainnya,” ungkap Sugeng, Senin (4/5).

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini melanjutkan, penurunan harga gas sebesar 6 dollar AS per MMBTU juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan badan usaha hilir dengan diberikan kompensasi penurunan harga.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Abraham Lunggana menilai penurunan harga gas industri menjadi 6 dollar AS per MMBTU tidak berpihak pada badan usaha

hilir. Hal ini dikarenakan pendapatan kontraktor tidak terganggu, sementara badan usaha hilir terpengaruh adanya penyesuaian tarif biaya penyaluran.

“Pak Menteri memberikan tontonan yang ketidakberpihakan kepada badan usaha hilir dalam menurunkan harga gas untuk industri bagian pendapatan kontraktor tidak diganggu alias menjaga keekonomian kontraktor,” katanya. Menurutnya, implementasi harga 6 dollar AS per MMBTU melalui Permen ESDM 8/2020 tentang Tatacara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu harus sesuai dengan ketentuan perundangan.

“Norma pengaturannya bertentangan dengan Perpres 40/2016 yang merupakan regulasi payungnya, seperti titik referensi harga 6 dollar AS di hulu berubah menjadi *plant gate*, kemudian mekanisme pelaksanaannya penyesuaian harga gas di hulu diubah menjadi penyesuaian tarif biaya transportasi (penyaluran) gas bumi,” jelas Haji Lulung, sapaan akrabnya. Ia melanjutkan, tanpa infrastruktur hilir maka gas bumi tidak dapat dimanfaatkan oleh industri. Sebaliknya, pemerintah perlu memperhatikan keberlanjutan badan usaha hilir.

Sisi lain, ia menilai penyesuaian harga gas yang diatur dalam Permen ESDM 8/2020 tidak sinkron dengan Perpres 40/2016. Dikatakannya, penerimaan negara dimungkinkan berkurang dalam rangka penyesuaian harga gas tertentu industri, di samping itu penyesuaian biaya transportasi juga turut membantu penyesuaian harga gas tertentu industri. Untuk menjadi bahan pertimbangan, ia mengusulkan Permen ESDM 8/2020 dicabut. ■ ann/es

Pemerintah Perlu Perhatikan Nasib Keluarga Perawat Korban Covid-19

Covid-19 kembali menelan korban jiwa. Kali ini, seorang tenaga medis di RSPI Sulianti Suroso bernama Heri Soesilo yang dipercaya sebagai salah satu anggota Tim Covid-19 di rumah sakit tersebut. Sebelum meninggal, Heri sempat dirawat di ruang isolasi rumah sakit tersebut setelah terpapar virus ketika menangani pasien Covid-19.

Untuk itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk bekerja lebih keras dan serius dalam penanganan wabah Covid-19. Ia

menekankan agar Pemerintah untuk memperhatikan nasib keluarga tenaga medis yang wafat dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Almarhum Heri Soesilo telah meninggalkan seorang istri dan dua orang putri. Oleh karena itu, saya mendesak agar Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk memberikan santunan yang memadai kepada keluarga yang ditinggal. Saya bahkan berharap agar Pemerintah bisa memberikan

”

SAYA BAHKAN BERHARAP AGAR PEMERINTAH BISA MEMBERIKAN BEASISWA PENDIDIKAN SAMPAI JENJANG SARJANA, KHUSUSNYA KEPADA KEDUA PUTRI ALMARHUM SEBAGAI BENTUK PENGHORMATAN ATAS JASANYA

beasiswa pendidikan sampai jenjang sarjana, khususnya kepada kedua putri almarhum sebagai bentuk penghormatan atas jasanya,” ungkap Bukhori melalui siaran persnya, Senin, (5/4).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu turut menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Heri. Bukhori berharap kabar duka atas wafatnya tenaga medis di Indonesia ini menjadi kabar terakhir, terutama bagi mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19.

“Semoga almarhum Mas Heri Soesilo dianugerahkan khusnul khotimah dan meninggal dalam keadaan syahid. Mas Heri telah berjuang keras menolong para pasien, semoga Allah menjadikannya ahli surga atas amal baiknya tersebut,” pungkask legislator dapil Jateng I itu. ■ tn/es

Anggota Komisi VIII DPR RI
Bukhori Yusuf. Foto: Andri/MAN



Jangan Ada Lagi Ego Sektoral dalam Penanganan Covid-19

Di tengah mewabahnya Covid-19, banyak informasi simpang siur terkait kebutuhan Alat Kesehatan dalam percepatan penanganan virus Corona, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi dan adanya ego sektoral antara kementerian dan lembaga.

Hal tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan Rapat Kerja Gabungan yang dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel secara virtual antara Komisi VI, VII dan IX DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Menteri Kesehatan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala LPNK (BPPT, LIPI, LAPAN), Kepala BPOM, dan Direktur LBM Eijkman, Selasa (5/5).

“Dalam memutus rantai Covid-19 kita harus bersinergi jangan ada lagi ego sektoral. Semua harus meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dan terintegrasi dalam penanganan percepatan wabah Covid-19 di Indonesia,” ungkap Melki, sapaan akrabnya.

Selain meminta meningkatkan koordinasi, dalam rapat gabungan yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga mendukung Menteri Kesehatan untuk mengurangi atau stop impor alat Kesehatan (alkes). “Impor harus disetop, sehingga dapat meningkatkan penggunaan alkes hasil produksi alam negeri atau yang telah dihasilkan dari Program Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19,” kata Sugeng.

Untuk memanfaatkan produk dalam negeri, pihaknya mendorong Menkes untuk melakukan relaksasi

”

DALAM MEMUTUS RANTAI COVID-19 KITA HARUS BERSINERGI JANGAN ADA LAGI EGO SEKTORAL. SEMUA HARUS MENINGKATKAN KOORDINASI SECARA MENYELURUH DAN TERINTEGRASI DALAM PENANGAN PERCEPATAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA

regulasi. Di antaranya; kemudahan persyaratan dan protokol khusus pengujian alat kesehatan dalam rangka percepatan pemanfaatan alkes dan produk hasil riset dan inovasi.

“Mendorong BUMN dan Kemenkes agar RS BUMN, RS pemerintah dan RS Swasta dapat membeli dan menggunakan alkes hasil inovasi Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19,” tandasnya.

Rapat Gabungan tersebut juga mendesak Menristek/Kepala BRIN, Menkes, Menperin, Menteri BUMN, Kepala BPPT, Kepala LIPI, Kepala LAPAN dan Direktur LBM Eijkman untuk segera mempercepat realisasi produksi massal alat pendeteksi Covid-19 dalam rangka percepatan implementasi penanganan wabah Covid-19. ■ rmm/es

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.
Foto: Arief/MAN



Legislator Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos



Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi. Foto: Jaka/MAN



INTEGRASI, AKURASI, DAN PEMUTAKHIRAN DATA PENERIMA BANSOS MERUPAKAN KEHARUSAN. SEBAB AKAN MEMPERMUDAH TUGAS PEMERINTAH SENDIRI

Sengkarut penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak wabah virus Corona (Covid-19) muncul di berbagai daerah. Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran. Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi meminta Pemerintah melakukan validasi data penerima bansos sesuai dengan kriteria. Acuan Pemerintah saat ini dalam menyalurkan bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, bahwa data tersebut kurang akurat, sehingga menyebabkan salah sasaran. "Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan Pemerintah tepat guna," ungkap Intan kepada *Parlementaria*, baru baru ini. politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjabarkan bahwa ketidakakuratan

data ini menjadi persoalan serius. Jika ini dibiarkan maka permasalahan tidak akan pernah selesai.

"Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," tegas Intan. Menurut Intan, sejak Maret 2020 Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi Covid-19. Realokasi APBN tersebut dianggarkan untuk penanganan kesehatan, dukungan untuk dunia usaha, termasuk jaring pengaman sosial yang dianggarkan Rp 110 triliun.

Dana tersebut dibelanjakan dalam bentuk bantuan PKH, bantuan tunai langsung, sembako dan lain-lain. Jumlah itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah. Namun, basis data

yang masih amburadul membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran. Dicontohkan wakil rakyat dapil Jawa Barat VI ini, di beberapa wilayah ada orang kaya yang mendapat bantuan. Bahkan, pegawai negeri sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima.

"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19," katanya. Intan mengatakan integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima bansos merupakan keharusan. Sebab akan mempermudah tugas Pemerintah sendiri. "Jadi mempermudah proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkas Intan. ■ rnm/sf

Pemda dapat Berikan Hibah Kepada PTN, PTS, dan Akademi Komunikasi

Pasal 40 ayat 3 dan 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; Pasal 83 dan Pasal 89 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti; Pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda; Pasal 83 ayat 1 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada PTN, PTS, dan Akademi Komunikasi; dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat memberikan hibah kepada SMA dan SMK di wilayahnya.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien dalam RDP secara virtual Komisi X DPR RI dengan Plt. Dirjen Pendidikan

Tinggi, Dirjen Vokasi, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, serta Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Selasa (28/4). “Dengan catatan, secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan bersifat tidak wajib serta tidak mengikat, menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,” ucap Hetifah.

Terhadap adanya beberapa permasalahan terkait hibah pendidikan, sambungnya, Komisi X DPR RI mendorong Plt. Dirjen Dikti, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen, dan Dirjen Vokasi Kemendikbud, serta Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk melakukan sosialisasi secara intensif dan memberikan pendampingan

terhadap Pemda dalam hal pengelolaan dan pemberian bantuan dalam bentuk hibah pendidikan agar bantuan hibah lebih efektif, tepat sasaran dan tidak melahirkan permasalahan hukum. “Terkait dampak pandemi Covid-19, Komisi X DPR mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Kemendagri agar merumuskan terobosan dan langkah-langkah afirmatif sesuai peraturan perundang-undangan dalam memanfaatkan anggaran di pemda untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, khususnya lembaga pendidikan swasta,” tutur Hetifah.

Hetifah juga menegaskan, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan Kemendagri untuk merumuskan formula penghitungan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD agar ada pemahaman yang sama bagi Pemerintah Daerah. “Komisi X mendorong Kemendikbud untuk menambah sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP), yang selanjutnya akan dibahas dalam Raker bersama Mendikbud,” tambah politisi Partai Golkar tersebut.

Dalam kesempatan RDP itu, Komisi X DPR RI menyampaikan Apresiasi kepada Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Vokasi, Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, serta Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri atas paparan dan pandangannya terkait regulasi hibah pendidikan dan pengelolaan pemberian belanja pendidikan yang substansinya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan pendidikan. “Kita tidak hanya membahas masalah hibah kepada perguruan tinggi dan sekolah, tetapi juga aspek pembiayaan pendidikan yang lebih luas dan juga masalah keuangan daerah,” ujar legislator dapil Kaltim itu. ■ dep/sf



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudien. Foto: Jaka/MAN

DPR Imbau Pemerintah dan Regulator Pantau Likuiditas Perbankan

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 5 skema stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19, diantaranya berupa restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM, Rabu (29/4) lalu. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai ketentuan subsidi bunga kredit dapat memberikan ruang likuiditas bagi perbankan berskala kecil seperti BPR/S maupun BPD.

“Kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak Covid-19 memang disatu sisi memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk menyelamatkan kelangsungan usahanya. Namun, kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank-bank kecil karena dapat menekan likuiditas perbankan. Hal tersebut terjadi seiring berkurangnya *cash inflow* dari angsuran kredit nasabah, yang dihadapkan bersamaan dengan pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga serta penarikan dana nasabah yang dipicu wabah pandemi,” kata Puteri dalam pernyataan tertulisnya kepada **Parlementaria**, Sabtu (2/5).

Dengan hadirnya bantuan subsidi bunga kredit, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini, setidaknya dapat mengurangi beban perbankan dengan menambah ruang likuiditas dan menjadi penyeimbang dalam memberikan keringanan kredit bagi debiturnya. Untuk diketahui bersama, Pemerintah telah menyiapkan mekanisme penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit bagi debitur UMKM selama 6 bulan.

Sementara, untuk debitur KUR dan pelaku usaha dengan nilai kredit hingga Rp 500 juta akan mendapatkan



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Arief/MAN

penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga 6 persen selama 3 bulan dan 3 persen selama 3 bulan berikutnya.

“Pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati. Apabila dengan dilaksanakannya penundaan angsuran menyebabkan suatu bank mengalami masalah likuiditas, mekanisme yang disiapkan Pemerintah seperti bantuan interbank, maupun cadangan bantuan likuiditas harus dipastikan dapat terlaksana dengan baik. Upaya ini dilakukan agar menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan, khususnya bagi bank skala kecil yang paling bersentuhan dengan masyarakat untuk mendukung kelangsungan usaha mereka,” jelasnya.

Legislator dapil Jawa Barat VII ini juga mengimbau Pemerintah bersama OJK untuk segera merampungkan dan menerbitkan peraturan pelaksana kebijakan stimulus bagi UMKM. Peraturan

pelaksana diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum atas pelaksanaan kebijakan oleh institusi terkait. Selain itu, peraturan pelaksana juga dapat menjadi dasar kebijakan bagi OJK untuk segera menindaklanjuti dengan membentuk peraturan terkait sebagai pedoman atau petunjuk teknis bagi masing-masing industri jasa keuangan yang terlibat.

“Sejak awal rapat bersama dengan mitra Komisi XI, saya selalu menekankan pentingnya peraturan pelaksana dan petunjuk teknis yang komprehensif. Mengingat kompleksitas *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, peraturan pelaksana yang tegas dan jelas, mutlak diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan yang holistik antar lembaga keuangan pelaksana kebijakan. Kedepannya, kami akan terus kawal penyusunan dan pelaksanaannya” pungkas Puteri. ■ alw/sf

Anggota DPR Kritik Rencana Masuknya 500 TKA ke Indonesia

Sejumlah Anggota Dewan mengkritisi masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Bahkan, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menganggap hal tersebut tidak adil, lantaran banyaknya masyarakat yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa pandemi virus Corona (Covid-19).

“Tentu tidak adil rasanya bagi kita, DPR harus bersuara terkait masuknya 500 tenaga kerja asing dan mungkin masih banyak lainnya yang akan masuk ke Indonesia. Di tengah banyak PHK, marilah kita bersuara,”

kata Herman dalam interupsinya pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5).

Politisi Partai Demokrat tersebut menyampaikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir dirinya banyak menerima aspirasi terkait masuknya TKA tersebut. Untuk itu, ia mengajak seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah.

“Karena bagaimanapun anak-anak bangsa kita ini juga memiliki kemampuan. Saya kira ini harus kita dorong, (masyarakat Indonesia) harus kita berikan ruang yang cukup dan tentu untuk berkarya lebih baik lagi dibandingkan dengan ruang pekerjaan yang kemudian diambil TKA,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta kepada Pimpinan DPR RI agar mendesak Pemerintah menghentikan penerimaan TKA hingga pandemi virus Covid-19 dan

”

SAYA KIRA INI HARUS KITA DORONG, (MASYARAKAT INDONESIA) HARUS KITA BERIKAN RUANG YANG CUKUP DAN TENTU UNTUK BERKARYA LEBIH BAIK LAGI DIBANDINGKAN DENGAN RUANG PEKERJAAN YANG KEMUDIAN DIAMBIL TKA

resesi ekonomi saat ini berakhir. Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini juga mendorong Pemerintah untuk membuka peluang sebesar-besarnya kepada tenaga lokal guna mengurangi gejala sosial akibat banyaknya angka pengangguran saat ini.

“Hingga April 2020 ini, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak pandemi Covid-19. Menurut data Center of Reform in Economic Indonesia, angka tersebut akan semakin bertambah hingga bisa mencapai angka 9 jutaan,” papar legislator dapil DKI Jakarta II tersebut.

Sebagai informasi, 500 TKA asal Tiongkok itu rencananya akan berkerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara. Meski telah disetujui Pemerintah, kedatangan tersebut ditolak oleh Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan menunda rencana tersebut sampai keadaan normal dan dinyatakan aman dari Covid-19. ■ alw/sf

Anggota Komisi VI DPR RI
Herman Khaeron.
Foto: Kresno/MAN



Rieke Usulkan Keringanan Pajak bagi UMKM Terdampak Covid-19

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan agar ada keringanan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengusaha yang terdampak Covid-19. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU

”

PANJA BISA MEMBERIKAN REKOMENDASI BERUPA DISKRESI KERINGANAN PAJAK BAHKAN PENGHAPUSAN UNTUK SEMENTARA WAKTU

Cipta Kerja, menurutnya Panja bisa memberikan rekomendasi berupa diskresi keringanan pajak bahkan penghapusan untuk sementara waktu.

“Bagi para pengusaha yang terkena dampak dari Covid-19, bagaimana ada keringanan pajak kalau bisa dihapuskan untuk sementara waktu diberi beberapa bulan. Sehingga ini menjadi keputusan politik legislasi yang diambil oleh Panja Cipta Kerja,” ungkap Rieke saat RDPU Baleg DPR RI secara virtual dan fisik yang menghadirkan pengusaha Emil Arifin dan Direktur Institute of Developing Entrepreneurship Sutrisno Iwantono, Selasa (5/5).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan agar RUU Cipta Kerja harus menguatkan sektor UMKM dan industri nasional. Menurutnya diskresi keringanan pajak merupakan langkah yang mendesak untuk diambil tanpa harus menunggu pembahasan selesai.

“Panja RUU Cipta Kerja ini memberikan rekomendasi yang tanpa harus menunggu pembahasan ini selesai, tetapi karena harus ada langkah cepat, maka ada beberapa diskresi hukum yang kita rekomendasikan untuk mengatasi dampak dari Covid-19,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Persoalan lain yang juga menjadi catatan penting Rieke adalah soal penekanan dalam RUU tersebut yakni negara wajib melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja. “Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan dalam pertemuan kita, negara itu wajib, bukan perlu melakukan berbagai upaya,” tandas legislator dapil Jawa Barat VII itu. ■ eko/es

Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
Foto: Eno/MAN





PIA DPR RI memberikan bantuan sembako kepada 1711 karyawan yang bertugas di Kompleks Parlemen. Foto: Eno/MAN

PIA DPR RI Bagikan Paket Sembako sebagai Wujud Kepedulian Sesama

Memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI menggelar bakti sosial (baksos) dengan tema “Bersama Menjalin silaturahmi dan Menebar Kasih”. Ketua Umum PIA DPR RI Ibu Tri Hatmanti Utut Adianto mengatakan pemberian paket sembako ini merupakan kegiatan atau program tahunan PIA DPR RI. Salah satunya sebagai wujud kepedulian PIA DPR RI terhadap sesama.

Terlebih lagi saat ini dunia, termasuk Indonesia, tengah dilanda pandemi Covid-19. Tentu tidak sedikit masyarakat yang merasakan dampak dari virus tersebut, khususnya karyawan-karyawan yang berada di lingkungan DPR RI. Ia berharap, penyaluran paket sembako yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa

(5/5) tersebut bisa sedikit mengurangi beban penderitaan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Baksos Ibu Nita Jhon Kennedy Aziz menjelaskan, paket sembako kali ini merupakan sumbangan dari ibu-ibu Anggota PIA DPR RI bekerjasama dengan Perum Bulog dan BRI. Adapun paket sembako tersebut diberikan kepada sekitar 1711 karyawan di lingkungan DPR RI. Seperti pramubakti atau *office boy*, petugas kebersihan atau *cleaning service*, serta petugas Pengamanan Dalam atau Pamdal.

“Acara ini akan digelar selama dua hari yakni tanggal 4-5 Mei 2020 di dua tempat, yakni di Gedung DPR RI dan di Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata. Namun karena saat ini kita tengah dilanda pandemi Covid-19, dan diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial

Berskala Besar) untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Maka dalam acara ini hanya mengundang beberapa perwakilan karyawan,” ujar Nita lebih lanjut.

Keduanya berharap semoga baksos yang digelar secara sederhana ini selain dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama, juga dapat membantu mengurangi beban penderitaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, serta besar harapan agar pandemi ini segera berakhir.

Baksos tersebut dihadiri oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI Korkesra Muhaimin Iskandar, Anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua PIA DPR RI Lita Azis Syamsuddin dan Rustini Muhaimin Iskandar, serta beberapa pengurus dan anggota PIA DPR RI lainnya. ■ ayu/es

Satgas Lawan Covid-19 DPR Terima 2.600 Bantuan Paket Sembako



Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima bantuan 2.600 paket sembako dari Komisi III DPR RI. Foto: Yoga/MAN

Satgas Lawan Covid-19 DPR RI menerima bantuan 2.600 paket sembako dari Komisi III DPR RI. Bantuan paket sembako tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruang kerjanya, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/5).

“Bantuan 2600 paket sembako ini rencananya akan kita didonasikan kepada para pegawai dan tim medis dari 44 Puskesmas Kecamatan se-DKI Jakarta, serta pegawai ambulans

gawat darurat DKI dan juga petugas pemakaman khusus Covid di Pondok Rangan dan Tegal Alur,” terang Dasco usai secara simbolis menerima paket sembako tersebut.

Paket bantuan sembako yang penyerahannya diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (F-NasDem), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh (F-PAN), serta didampingi Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan) kepada Satgas Lawan Covid-19 DPR RI itu masing-masing terdiri dari beras premium 3 kg, gula

pasir 1 kg, terigu 1 kg dan minyak goreng 1 liter.

Dasco menambahkan, pemberian bantuan sembako ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan penghargaan dari Anggota Dewan selaku wakil rakyat kepada orang-orang yang bertugas di garda terdepan dan menjadi bagian dalam penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Dengan adanya bantuan sembako ini, diharapkan dapat ikut meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19, terhadap bahan pokok yang dibutuhkan. ■ dep/sf

Paripurna DPR Terima Laporan BURT Soal Rencana Kerja dan Anggaran DPR TA 2021



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyerahkan pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI 2021 kepada Pimpinan DPR RI. Foto: Jaka/MAN

DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5). Rapat Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel dan diikuti oleh 280 Anggota DPR RI secara virtual dan 36 secara fisik.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin, Rapat Paripurna tersebut juga mengagendakan laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI terkait Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2021.

“Berkenaan dengan agenda berikutnya yaitu Laporan BURT

terhadap pembahasan rancangan kerja anggaran DPR RI tahun anggaran 2021, dalam hal ini kami persilakan kepada Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga Agung Budi Santoso, waktu dan tempat kami persilakan,” kata Azis saat memimpin rapat.

Dalam hal ini, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyerahkan pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI tahun anggaran 2021 secara simbolis dan diterima langsung oleh Ketua DPR RI.

“Terima kasih kepada Bapak Agung Budi Santoso yang telah memberikan laporan secara simbolis di dalam Rapat Paripurna ke 14 Tanggal 5 Mei 2020. Berdasarkan hal-hal laporan BURT berkenaan dengan Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI ini, apakah dapat kita setujui dan kita ambil keputusannya dalam Rapat Paripurna ini?” tanya Azis dan

serentak dijawab ‘setuju’ oleh seluruh Anggota DPR RI yang menghadiri Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 ini memiliki tiga agenda yaitu, pertama laporan Badan Pemeriksa Keuangan (RI) mengenai Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 disertai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019 yang dibacakan dan diserahkan oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna.

Kedua, laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Serta ketiga, Laporan BURT terhadap Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2021. ■ alw/es

Banggar DPR-Pemerintah Sepakati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Diparipurnakan

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk dibahas di Tingkat II atau Paripurna. Perppu ini bertujuan untuk penanganan pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional.

Dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah membahas RUU tersebut, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan DPR RI bersama Pemerintah menyepakati persetujuan RUU mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Ia juga menambahkan

bahwa DPR akan mendukung penuh secara terukur dan secermat mungkin agar tidak terjadi risiko hukum.

“Kami sepakat dan mendukung penuh, jika setiap kebijakan harus dilakukan secara *prudent*, terukur, dan dilakukan secermat mungkin. Agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan dampak hukum di kemudian hari. Kami akan terus mengawal proses pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19, tentunya dengan instrumen yang kami miliki. Sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan konstitusi,” jelasnya.

Sementara itu Fraksi PKS menyatakan menolak menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan Anggotanya Ecky Awal Muharam yang menyatakan

bahwa apabila Perppu ini disahkan menjadi UU, maka berpotensi terjadi pelanggaran konstitusi, sebab menurutnya ada beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD 1945 seperti kuasa pemerintah dalam menetapkan APBN yang mereduksi kewenangan DPR RI.

“Ini terkait dengan kerugian keuangan negara. Perppu di pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa perubahan postur APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden. Hal ini telah menghilangkan kewenangan serta peran DPR untuk berada dalam memproses APBN atau APBN-P yang diatur oleh UUD 1945 yang diatur dalam pasal 23 ayat 2 dan 3,” tegas Ecky.

Sementara itu delapan fraksi lainnya mengaku menyetujui Perppu ini untuk disahkan dengan berbagai catatan yang disampaikan kepada Pemerintah. Salah satunya Anggota Banggar dari Fraksi PKB Siti Mukarommah yang meminta apabila situasi telah kembali normal, Pemerintah harus mengembalikan fungsi DPR RI sebagai pengawas anggaran melalui Undang-Undang Perubahan.

“Fraksi PKB berpendapat jika akhirnya DPR menyetujui Perppu ini, maka fungsi anggaran DPR ke depan ketika kondisi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sudah kembali dalam situasi normal, Pemerintah wajib mengembalikan fungsi DPR di bidang pengawasan keuangan negara dengan cara membuat Undang-Undang Perubahan atas Perppu yang sudah ditetapkan menjadi UU bersama,” terangnya. ■ er/sf



Pimpinan Anggota Banggar bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai penandatanganan pengesahan RUU Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Foto: Kresno/MAN



**PIMPINAN dan ANGGOTA DPR RI
Serta SEKRETARIAT JENDERAL dan BADAN KEAHLIAN DPR RI
Mengucapkan**

SELAMAT HARI RAYA

Waisak

— 2564 BE —

